

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan Di Kabupaten Berau

Siti Munawaroh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Berau

e-mail korespondensi: Siti Munawaroh (siti010890@gmail.com)

ABSTRAK, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau dengan didasari teori-teori yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau sudah baik, hal ini terbukti dengan terdapatnya syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban dan terdapatnya karakteristik akuntansi pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban, Akuntabilitas

ABSTRACT, The purpose of this study was to find out how the implementation of accountability accounting at PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Representative Office in Berau Regency. Data analysis conducted in this research is descriptive method. Based on the results of research conducted by the author to find out how the application of accountability accounting at PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Representative Office in Berau Regency based on the theories studied and the discussions carried out in previous chapters, the authors can conclude that the accountability applied at PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Representative Office in Berau Regency is good, this is proven by the existence of accountability accounting requirements and the existence of accountability accounting characteristics.

Keywords: Accountability Accounting, Accountability

1. Pendahuluan

Setiap perusahaan yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang maksimum, melayani dan meningkatkan kepuasan konsumen, mencapai pertumbuhan yang pesat serta menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah perusahaan memerlukan sesuatu sarana, salah satunya struktur organisasi yang didalamnya mencakup pendeklegasian

wewenang. Struktur organisasi menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi (Handoko, 2015:169).

Perusahaan yang berskala kecil dan masih sedikit aktivitas operasinya, pada umumnya pimpinan perusahaan dapat mengendalikan semua aktivitas dan permasalahan yang dihadapi. Namun dengan semakin bertambah besarnya perusahaan, maka pimpinan tidak mungkin dapat mengendalikan secara menyeluruh aktivitas dan masalah yang timbul dalam perusahaan. Untuk itu pimpinan harus melakukan pendeklegasian wewenang dan tanggungjawab pada tingkat manajemen di bawahnya (para pelaksana), sehingga masalah yang ada dapat ditangani lebih baik dan cermat. Dengan adanya pendeklegasian tugas dan wewenang akan timbul berbagai tingkat tanggungjawab dan wewenang dalam suatu perusahaan, oleh karenanya perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban (Lestari, 2011).

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang meng-ukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk meng-operasikan pusat pertanggungjawaban sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen (Hansen dan Mowen, 2009:560). Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya, perolehan pendapatan atau penggunaan dana investasi. Pusat pertanggungjawaban utama terdiri dari empat macam yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi (Hansen dan Mowen, 2009:560). Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk mencapai salah satu atau beberapa tujuan yang secara individual serasi, selaras dan seimbang dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jejang hirarki dalam organisasi (Hansen dan Mowen, 2006:116).

Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi didalam pusat yang dipimpinnya dan secara periodik manajer tersebut akan memper-tanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan perusahaan (Sriwidodo, 2010). Penerapan akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan suatu penerapan akuntansi yang menghasilkan laporan akuntansi untuk setiap tingkatan manajemen dalam suatu organisasi. Penerapan ini terutama ditujukan sebagai alat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan biaya-biaya dari setiap manager pusat pertanggungjawaban. Pelaksanaan pertanggungjawaban ini harus dilakukan secara objektif karena menjadi salah satu penentu kebijakan perusahaan di masa depan.

Pelaporan pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai salah satu alat penilaian kinerja atau prestasi terhadap para manajer tingkat bawah. Penilaian prestasi kerja yang telah dilaksanakan adalah dengan membandingkan realisasi pelaksanaan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. adanya tolok ukur penilaian prestasi akan mendorong dan memotivasi para pelaksana pada pencapaian tujuan perusahaan (Muhamar, 2011).

PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial, khususnya asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur Undang-Undang No.33 dan 34 Tahun 1964. Sebagai sebuah perseroan, PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau juga mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya yaitu melaksanakan operasional perusahaan dengan efektif dn efisien untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.

PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau dalam menjalankan operasinya didasarkan pada penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang berpedoman kepada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sosialisasi GCG dilakukan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman mengenai GCG, kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Implementasi GCG dikaitkan dengan sistem *reward and punishment* yang dikembangkan oleh perusahaan.

Sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penerapan GCG, PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau harus menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya, untuk mendukung hal tersebut maka sangat dibutuhkan adanya akuntansi pertanggungjawaban. Sebagaimana observasi awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau rutin dilaksana-kan, namun evaluasi atas laporan tersebut dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Tarakan dan implementasi atas hasil evaluasi laporan tersebut tidak jelas pelaksanaannya. Hal ini menjadikan permasalahan bagi manajemen PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau dalam pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat strategis dalam lingkungan Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau. Manajemen tidak mengetahui apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik dan efektif di lingkungan PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau.

Evaluasi atas laporan pertanggungjawaban dapat membantu pihak manajemen dalam membandingkan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat menilai prestasi kerja masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban sesuai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Standar tersebut merupakan tolak ukur penilaian prestasi kerja, yang akan mendorong motivasi kerja para karyawan untuk bekerja lebih baik dan lebih berprestasi. Maka dalam hal ini, akuntansi pertanggung-jawaban akan menjadi landasan untuk terciptanya suatu sistem penilaian kinerja manajer, yang berarti pula terwujudnya proses pengendalian dan penilaian prestasi yang melekat pada setiap langkah perusahaan dari bagian terkecil sampai keseluruhan bagian dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan hal yang penting untuk diterapkan karena dapat menunjang pencapaian tujuan umum perusahaan dan membantu pihak manajemen dalam menyusun kebijaksanaan perusahaan dimasa yang akan datang. Akuntansi pertanggungjawaban mempunyai peranan dalam menilai prestasi manajemen, maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akuntansi pertanggungjawaban tersebut dengan judul: "*Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau*".

2. Metode

Analisis terhadap penerapan akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2006:412), yaitu:

1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas sesuai wewenang dan tanggungjawab setiap tingkatan manajemen. Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang mampu menghubungkan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi itu sendiri dengan tanggung jawab biaya secara langsung.
2. Anggaran biaya disusun menurut pusat pertanggungjawaban. Anggaran biaya harus disusun sesuai dengan tingkatan manajemen dalam organisasi. Tiap-tiap bagian dalam pusat pertanggungjawaban menyerahkan anggaran biayanya kepada manajer di atasnya, kemudian manajer pusat pertanggungjawaban menyerahkan rancangan-rancangan anggaran tersebut kemudian dikoordinasikan dan diselaraskan satu sama lain oleh komite anggaran.
3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya dikendalikan oleh manajer yang pusat pertanggungjawaban. Biaya terkendalikan adalah biaya yang secara langsung dipengaruhi oleh seorang manajer dalam jangka waktu tertentu, sedangkan biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggung-jawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu.
4. Sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi. Untuk kepentingan pengumpulan biaya dalam suatu akuntansi pertanggungjawaban, maka setiap pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam perusahaan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen dalam struktur organisasi perusahaan.
5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban biaya digolongkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenjang organisasi, sebagai berikut:
 - a) Laporan Pertanggungjawaban Biaya - Manajer Bagian. Laporan ini disajikan untuk para manajer bagian.
 - b) Laporan pertanggungjawaban Biaya - Manajer Departemen. Laporan ini disajikan untuk para manajer departemen.
 - c) Laporan pertanggungjawaban Biaya - Direksi. Laporan ini disajikan kepada para direktur

3. Hasil dan Pembahasan

A. Berperannya Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja.

Secara keseluruhan terdapat 100% yang menjawab "Ya" pernyataan-pernyataan tentang terpenuhinya syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban dan karakteristik akuntansi pertanggung-jawaban. Hal ini membuktikan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau telah menetapkan akuntansi pertanggungjawaban secara memadai, Terdapatnya syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban yang memadai yaitu sebagai berikut:

1. Struktur organisasi : PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau telah terdapat struktur organisasi yang menetapkan secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab untuk tiap tingkatan manajemen, hal ini didasarkan pada hasil dari jawaban responden mengenai pernyataan yang diajukan adalah 100% menjawab "Ya".
2. Penyusunan anggaran: Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau telah menerapkan prosedur penyusunan anggaran yang merupakan rencana kerja perusahaan, yang disusun dengan melibatkan tiap bagian atau departemen yang ada, disusun untuk jangka waktu tertentu, hal ini

- didasarkan pada hasil dari jawaban responden mengenai pernyataan yang diajukan adalah 100% menjawab "Ya".
3. Pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali: Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau telah terdapat sistem akuntansi biaya dan pendapatan yang memisahkan biaya dan pendapatan terkendali dan tidak terkendali, hal ini didasarkan pada hasil dari jawaban responden mengenai pernyataan yang diajukan adalah 100% menjawab "Ya".
 4. Klasifikasi kode rekening: Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau telah mencantumkan kode rekening atau kode perkiraan. Namun pengklasifikasian kode rekening tersebut belum mencantumkan kode bagiannya dan belum menggunakan alfabet, hal ini didasarkan pada hasil dari jawaban responden mengenai pernyataan yang diajukan adalah 100% menjawab "Ya".
 5. Laporan pertanggungjawaban: Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau telah terdapat sistem pelaporan kinerja kepada manajer yang bertanggung jawab dalam menjelaskan aktivitasnya, hal ini didasarkan pada hasil dari jawaban responden mengenai pernyataan yang diajukan adalah 100 % menjawab "Ya".
- B. Terdapatnya karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut:
1. Identifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban: Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau telah terdapat pusat-pusat pertanggung-jawaban yang terdiri dari pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi, hal ini didasarkan pada hasil dari jawaban responden mengenai pernyataan yang diajukan adalah 100% menjawab "Ya".
 2. Standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer: Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau sudah memiliki standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, hal ini didasarkan pada hasil dari jawaban responden mengenai pemyataan yang diajukan adalah 100% menjawab "Ya".
- C. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau terdapat perbandingan antara realisasi dengan anggaran untuk mengukur prestasi manajer pusat pertanggung-jawaban, hal ini didasarkan pada hasil dari jawaban responden mengenai pernyataan yang diajukan adalah 100% menjawab "Ya".
- D. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman. Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau telah memberikan penghargaan bila kinerjanya dinilai baik, salah satunya adalah apabila hasil perbandingan antara anggaran dan realisasinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, hal ini didasarkan pada hasil dari jawaban responden mengenai pernyataan yang diajukan adalah 100% menjawab "Ya". Apabila kinerjanya dinilai tidak baik manajer secara individual diberi hukuman memperoleh hasil jawaban dari responden sebanyak 80% menjawab "Tidak" dan 20% menjawab "Ya". Hal ini karena ada bagian tertentu yang pengukuran kinerjanya tidak dipengaruhi oleh perbandingan antara anggaran dengan realisasinya melainkan dari kinerja sehari-harinya.

4. Kesimpulan

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban

dengan baik, dengan demikian menerima hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini.

5. Daftar Pustaka

- (1) Belkoui, Ahmed Riahi. 2006. *Accounting Theory: Teori Akuntansi*, Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- (2) Handoko, T. Hani. 2015. *Manajemen*, Edisi 2. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- (3) Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen. 2006. *Management Accounting: Akuntansi Manajemen*, Edisi Ketujuh, Buku 2. Salemba Empat, Jakarta.
- (4) Mawarni, Zellinda. 2016. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 5, Nomor 2, Februari 2016. ISSN : 2460-0585.
- (5) Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.
- (6) Rudianto. 2007. *Akuntansi Manajemen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- (7) Sadeli, Lili M. 2016. *Dasar-dasar Akuntansi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- (8) Selamat, Vega Liana. 2014. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan pada PT Asean Motor International cabang Manado*. Jurnal EMBA. Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 1482-1490. ISSN 2303-1174.
- (9) Simamora, Henry. 2014. *Akuntansi Manajemen*. Salemba Empat, Jakarta.
- (10) Siregar, Baldric, Bambang Suripto, Dody Hapsoro, Eko Widodo Lo serta Frasto Biyanto. 2013. *Akuntansi Manajmen*. Salemba Empat, jakarta.
- (11) Soekarno, E. 2006. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- (12) Sriwidodo, Untung. 2010. *Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Prestasi Kerja*. Jurnal Akuntansi dan Siatem Teknologi Informasi. Vol. 8, No. 1, April 2010.
- (13) Warindrani, A. K. 2007. *Manajemen Biaya*. Edisi Delapan, Jilid 1 dan 2. Salemba Empat, Jakarta.